

**STUDI TENTANG EFEKTIVITAS MEKANISME  
PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG  
SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) DI KELURAHAN  
GUNUNG SAMARINDA KECAMATAN BALIKPAPAN  
UTARA KOTA BALIKPAPAN**

**Rahardita**

**eJournal Administrasi Negara  
Volume 3, Nomor 1, 2015**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Studi tentang Efektivitas Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

Pengarang : Rahardita

NIM : 1002015095

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Negara Fisip Unmul.

Samarinda, 2 Februari 2015

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si**  
**NIR. 19590308 198403 2 001**

**Drs. H. Burhanudin, M.Si**  
**NIP. 19580123 198601 1 001**

---

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH BAGIAN PERPUSTAKAAN S1 KONSENTRASI STUDI ADMINISTRASI NEGARA**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b> : eJournal Administrasi Negara	<b>Ketua Program Studi Administrasi Negara</b>  <b><u>Prof. Dr.H. Adam Idris, M.Si</u></b> <b>NIP. 19600114 198803 1 025</b>
<b>Volume</b> : 3	
<b>Nomor</b> : 1	
<b>Tahun</b> : 2015	
<b>Halaman</b> : 47 - 60 (Ganjil)	

# **STUDI TENTANG EFEKTIVITAS MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) DI KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA KOTA BALIKPAPAN**

**Rahardita<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan Keefektivan dari Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Khususnya di Kelurahan Gunung Samarinda.*

*Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian dalam skripsi ini meliputi proses penerimaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Penyerahan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) ke PT.POS, Pencocokan Data, Perolehan Manfaat dari Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) itu sendiri, serta faktor penghambat penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Adapun analisis data yang terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) belum Efektif. Hal ini dilihat dari kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, begitupun Pemerintah Daerah dengan Wilayahnya, terbukti data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) belum tepat sasaran. Karena masih menggunakan basis data PPLS 4 tahun sekali dari BPS Pusat yakni tahun 2011. Untuk mengatasinya Pemerintah memberikan solusi untuk pemutakhiran data kepesertaan penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk jangka waktu dekat ini cukup memberikan dampak positif dalam penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) terutama dalam direktori penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS) pengganti agar dana yang dialokasikan Pemerintah bisa sampai Ke tangan-tangan yang benar-benar membutuhkan.*

**Kata Kunci :***Efektivitas Penyaluran BLSM.*

## **PENDAHULAN**

### ***Latar Belakang***

Didalam Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang penanggulangan fakir miskin, pada UU ini “Penanggulangan fakir miskin merupakan kebijakan Nasional

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email : [semanroch@yahoo.co.id](mailto:semanroch@yahoo.co.id)

yang berpihak kepada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan”. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut pemerintah melaksanakan pembangunan yang diarahkan pada upaya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam rangka membentuk Indonesia seutuhnya.

Kenyataannya di lapangan penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) khususnya di Kelurahan Gunung Samarinda tidak memenuhi 9 dari 14 kriteria rumah tangga miskin yang telah ditetapkan BPS sebagai penerima (BLSM) Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, diantaranya:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu atau rumbia atau kayu berkualitas rendah dan tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung atau sungai atau air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang atau minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging atau susu atau ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu set pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga seperti, petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000 per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga /tidak sekolah atau tidak tamat SD atau hanya SD.
14. Tidak memiliki aset tabungan atau barang yang mudah dijual dengan harga minimal Rp.500.000 seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Masih banyak masyarakat di Kelurahan Gunung Samarinda Balikpapan yang sudah jelas terdaftar sebagai warga gakin, tidak menerima manfaat dari program kompensasi kenaikan BBM “(BLSM) Bantuan Langsung Sementara Masyarakat”. Jumlah pemegang kartu gakin menurut data verifikasi dan validasi berkala kantor Kelurahan Gunung Samarinda tertanggal 25 Maret tahun 2013, tercatat sebanyak 68 orang warga gakin yang terdiri dari 23 KK. Sedangkan data dari PT.POS Indonesia di Balikpapan terdapat sekitar 262 KK warga Kelurahan Gunung Samarinda yang mendapat (BLSM) Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa penyaluran Dana (BLSM) Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Kelurahan Gunung Samarinda tidak tepat sasaran..maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: “*Studi tentang Efektivitas Mekanisme Penyaluran Dana Sementara Masyarakat(BLSM)*”

di Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Mekanisme Penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat proses Penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan?

### **Tujuan Penelitian**

Sebagai suatu karya ilmiah maka tentunya ada tujuan yang penulis harapkan dalam penulisan skripsi ini. “tiap penelitian harus mempunyai tujuan atau tujuan-tujuan yang harus dicapai”. Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sudah efektif dan tepat sasaran di Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat proses Penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

### **Kegunaan Penelitian**

1. Dari Segi teoritis :
  - a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang Administrasi Negara secara khususnya kajian ilmu kebijakan publik.
  - b. Tambahan wawasan serta pengetahuan dan kemampuan untuk membuat karya ilmiah bagi penulis.
2. Dari Segi praktis :
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi instansi terkait program BLSM, khususnya BPS Kota Balikpapan, PT.POS Indonesia di Balikpapan, dan Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Balikpapan.
  - b. Sebagai tambahan informasi bagi semua pihak baik pemerintah, kalangan akademik atau mahasiswa yang tertarik pada masalah yang diteliti.

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Teori dan Konsep***

### ***Kebijakan Publik***

Bridgman dan Davis dalam Suharto (2007:3) kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Hoogwood dan Gunn dalam Suharto (2007:4) kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna kebijakan hanyalah milik atau domain pemerintah saja. Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (misalnya karang taruna, pendidikan kesejahteraan keluarga/PKK) dan lembaga-lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula.

### ***Mekanisme Kebijakan***

Dunn dalam Subarsono (2005:9), proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual..

### ***Pelayanan Publik***

Moenir dalam Pasolong (2007:128) mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.

Menurut Kotler dalam Sinambela (2006:4), pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

### ***Efektivitas Kebijakan***

Gibson dalam Waluyo (2007:84) menyebutkan bahwa terdapat dua pendekatan dalam mengidentifikasi keefektivan, yaitu: pendekatan terhadap menurut tujuan dan pendekatan menurut teori sistem. Pendekatan menurut tujuan adalah untuk merumuskan dan mengukur keefektivan melalui pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan usaha kerjasama. Sedangkan pendekatan teori sistem menekankan pada pentingnya adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektivan.

### ***Kemiskinan***

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial dan kemiskinan hal yang sangat menarik untuk menjadi topik pembahasan, karena masalah kemiskinan menarik banyak kalangan dan mencakup banyak variable didalamnya seperti definisi, kategori, sebab-sebab

terjadinya kemiskinan dan berbagai variable yang variatif. Menurut Ritonga (2003:3) kemiskinan adalah kondisi ekonomi yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupan. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

### ***Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S)***

Kementerian Sosial (dalam Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 2013:8) Secara umum, Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dilaksanakan untuk melindungi Rumah Tangga miskin dan rentan dari resiko sosial yang ditimbulkan oleh perubahan situasi dan/atau kebijakan nasional. Secara khusus, P4S dan BLSM diluncurkan sebagai kompensasi karena adanya kebijakan penyesuaian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Sasaran penerima manfaat P4S dan BLSM berasal dari Rumah Tangga miskin dan rentan yang terdapat dalam basis data hasil pendataan yang telah dilaksanakan, yaitu Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011.

### ***Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)***

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia (dalam Tim Sosialisasi Penyesuaian Bahan Bakar Minyak, 2013:28) Pemerintah telah menetapkan mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Sementara untuk Masyarakat (BLSM) yang tertuang dalam Intruksi Presiden No.5 Tahun 2013 Tentang sosialisasi penyesuaian subsidi BBM. Diantaranya program pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang ditetapkan Pemerintah dalam rangka kompensasi atas kenaikan harga BBM BLSM merupakan bantuan tunai langsung sementara untuk membantu mempertahankan daya beli Rumah Tangga miskin dan rentan agar terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat penyesuaian harga BBM. BLSM disalurkan untuk membantu Rumah Tangga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan hidup Rumah Tangga, pembelian obat-obatan kesehatan, biaya pendidikan dan keperluan-keperluan lainnya.

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional adalah suatu abstraksi dari kejadian yang menjadi sasaran penelitian dan juga memberi batasan tentang luasnya ruang lingkup penelitian. Definisi konsepsional dalam penelitian ini yaitu Efektivitas Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) adalah pencapaian tujuan program paket kompensasi yang diajukan pemerintah untuk membantu Rumah Tangga miskin dan rentan yang terkena dampak kenaikan

harga bahan bakar minyak (BBM), yang dalam penelitian ini dilaksanakan pada Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

### ***Jenis***

#### ***Penelitian***

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif menurut Menurut Dantes (2012:51), penelitian deskriptif adalah sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskriptifkan suatu peristiwa/fenomena secara sistematis sesuai dengan apa adanya.”.

#### ***Fokus Penelitian***

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka fokus penelitian yakni sebagai berikut:

1. Efektivitas Mekanisme Penyaluran dana BLSM:
  - a. Penerimaan Kartu Perlindungan sosial (KPS) bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang didistribusikan melalui PT.POS,
  - b. Penyerahan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) & Kartu identitas oleh Rumah Tangga Sasaran (RTS) ke PT.POS,
  - c. Pemeriksaan data pembayaran Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Kartu identitas Rumah Tangga Sasaran oleh petugas PT.POS, dan
  - d. Perolehan manfaat program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bagi Rumah Tangga Sasaran.
2. Faktor penghambat proses Penyaluran Dana Bantuan Langsng Sementara Masyarakat (BLSM).

#### ***Lokasi Penelitian***

Adapun Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah Kelurahan Gunung Samarinda, BPS Kota Balikpapan, dan PT.POS Indonesia di Balikpapan.

#### ***Jenis dan Sumber Data***

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan sebagai sumber untuk memperoleh data dalam melengkapi penulisan skripsi ini. Pemilihan informan didasarkan pada subyek yang banyak memiliki informasi dalam permasalahan yang akan diteliti dan bersedia memberikan data. Informan menurut Moleong (2004: 132) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Data Primer (Responden/Wawancara). Yang menjadi *key informant* diantaranya Lurah Gunung Samarinda, BPS Kota Balikpapan, dan PT.POS Indonesia di Balikpapan. Sedangkan yang menjadi *Informan* dalam penelitian ini adalah Staf/Pegawai Kelurahan Gunung Samarinda, Staf/Pegawai BPS Kota Balikpapan, Staf/Pegawai PT.POS Indonesia di Balikpapan, Beberapa Masyarakat Penerima BLSM di Kelurahan Gunung Samarinda.

Sedangkan Data Sekunder diperoleh dari Dokumen – dokumen, arsip – arsip, Laporan, dan Buku – Buku Refrensi di perpustakaan sesuai dengan Fokus Penelitian.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Untuk melengkapi hasil penelitian ini, penulis memerlukan data sebagai pendukung keseluruhan terhadap penulisan proposal ini dalam mencari dan mengumpulkan data-data tersebut penulis menggunakan teknik - teknik sebagai berikut:

1. *Library Research*, yaitu penulis menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penulisan proposal ini dengan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penulisan proposal ini.
2. *Field Work Research*, yaitu penulis mengadakan penelitian langsung dilapangan terhadap objek penelitian dimana dalam tahap ini dipergunakan teknik-teknik sebagai berikut :
  - a. Observasi;
  - b. Wawancara;
  - c. Dokumentasi.

### ***Analisis Data***

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data Kualitatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (tjetjep Rohand Rohidi) (2007: 20). Mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari:

1. Tahap Pengumpulan data yaitu Proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian.
2. Tahap Reduksi Data yaitu Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.
3. Tahap Penyajian Data yaitu Penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan.
4. Tahap Penarikan Kesimpulan/Verifikasi yaitu Penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Gambaran Umum lokasi Penelitian***

#### ***Letak Geografis***

Kelurahan Gunung Samarinda adalah salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai luasa wilayah 221,20 Ha, meliputi 108,00 Ha dataran rendah, 90,00 Ha Bebukit – Bukit, 5,00 Ha dataran tinggi/ perbukitan dan Lain – lain 3,00 Ha. Secara geografis ketinggian tanah 0,00 mdl dari permukaan laut, dan banyaknya

curah hujan mencapai 0,20 mm/thn, selain itu sebagian wilayahnya diperuntuhkan sebagai pemukiman, prasarana umum, perkantoran, taman, kuburan, gedung sekolah dan pemerintahan. dengan batas-batas wilayah yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Batu Ampar, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sumber Rejo, Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Samarinda Baru, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Muara Rapak

### ***Hasil Penelitian***

Berikut ini penulis akan membahas hasil-hasil penelitian mengenai studi tentang Efektivitas Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

Dalam pengumpulan data penulis memperoleh data primer melalui wawancara dengan Lurah Gunung Samarinda, BPS Kota Balikpapan, dan PT.POS Indonesia di Balikpapan sebagai *key informan* dan sedangkan yang menjadi *informan berkaitan* adalah Staf/Pegawai Kelurahan Gunung Samarinda, Staf/Pegawai BPS Kota Balikpapan, Staf/Pegawai PT.POS Indonesia di Balikpapan, Beberapa Masyarakat Penerima BLSM di Kelurahan Gunung Samarinda., sedangkan data sekunder diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain seperti arsip-arsip dokumen yang ada kaitanya dengan permasalahan yang diteliti diantara dari segala aspek yang berkaitan dengan Efektivitas Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kelurahan Gunung Samarinda.

### ***Pembahasan***

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Efektivitas Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kelurahan Gunung Samarinda. sesuai dengan fokus penelitian yaitu :

#### ***Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)***

##### ***Proses Penerimaan Kartu Perlindungan sosial (KPS) bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang didistribusikan melalui PT.POS***

PT. Pos Indonesia mendistribusikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) ke Rumah Tangga Sasaran tanpa dikenai biaya apapun, didampingi oleh aparat desa/kelurahan. PT. Pos Indonesia mendata KPS yang kembali (retur) dikarenakan berbagai alasan di antaranya: Rumah kosong, Alamat tidak lengkap, Alamat tidak dikenal, Rumah Tangga pindah, Kiriman ditolak, Rumah Tangga yang seluruh anggotanya telah meninggal.

Setelah proses distribusi KPS, PT. POS Indonesia membuat daftar KPS yang tidak terkirim (retur) dan menyampaikannya kepada Kepala Desa/Lurah. Berdasarkan daftar KPS yang tidak terkirim (retur), Kepala Desa/Lurah mengisi dan menyusun daftar Rumah Tangga Pengganti melalui musdes/muskel

menggunakan Formulir Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) memfasilitasi pengisian dan penyusunan daftar Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti. TKSK memfasilitasi pengiriman kembali KPS yang dikembalikan oleh Rumah Tangga yang merasa tidak berhak, atau penggantian berdasarkan musdes/muskel, untuk selanjutnya direkapitulasi di tingkat kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya. TKSK menginformasikan kepada Camat Formulir Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti dari masing-masing desa/kelurahan di kecamatan tersebut.

### ***Proses Penyerahan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) & Kartu Identitas Rumah Tangga Sasaran (RTS) ke PT.POS***

Penerima BLSM diwajibkan membawa KPS dan dokumen pendukung ke PT. Pos Indonesia untuk mengambil uang tunai. Untuk menghindari antrian yang berlebihan, lokasi dan jadwal pembayaran akan ditentukan oleh kantor pos dan pemerintah daerah setempat. Pada hari yang dijadwalkan, RTS dapat mengambil bantuan di kantor pos terdekat. Untuk daerah terpencil, dimana tidak terdapat kantor pos, PT. POS Indonesia akan mendatangi daerah tersebut untuk membuka loket khusus. Apabila Kepala Rumah Tangga yang namanya tertera di KPS tidak dapat pergi untuk mengambil sendiri bantuan BLSM (misalnya karena sakit), maka dapat diwakilkan oleh anggota Rumah Tangga lainnya. Pengambilan dana dapat dilakukan dengan menyertakan surat kuasa dan bukti pendukung tambahan (Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili) sebagai bukti bahwa yang mewakili adalah bagian dari Rumah Tangga yang sama.

### ***Pemeriksaan data pembayaran Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Kartu identitas Rumah Tangga Sasaran oleh petugas PT.POS***

Apabila Kepala Rumah Tangga yang namanya tertera di KPS tidak dapat mengambil sendiri bantuan BLSM (misalnya karena sakit), maka dapat diwakilkan oleh anggota Rumah Tangga lainnya. Pengambilan bantuan dapat dilakukan dengan menyertakan surat kuasa dan bukti pendukung tambahan (KK atau Surat Keterangan Domisili) sebagai bukti bahwa yang mewakili adalah bagian dari Rumah Tangga yang sama.

### ***Perolehan Manfaat Program (BLSM) Bantuan Langsung Sementara Masyarakat bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS).***

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) merupakan bantuan tunai langsung sementara untuk membantu mempertahankan daya beli Rumah Tangga miskin dan rentan agar terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) disalurkan untuk membantu Rumah Tangga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan hidup Rumah Tangga, pembelian obat-obatan kesehatan, biaya pendidikan dan keperluan-keperluan lainnya.

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bukan solusi jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan, namun merupakan solusi jangka pendek untuk menghindarkan masyarakat miskin dari menjual aset, berhenti sekolah, dan mengurangi konsumsi makanan yang bergizi. Evaluasi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan sebelumnya (tahun 2005 dan 2008) membuktikan bahwa program ini telah membantu Rumah Tangga miskin dan rentan dalam menjaga daya beli setelah kenaikan harga dengan tetap mempertahankan kemampuan dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan.

### ***Faktor-faktor Penghambat Penyaluran Dana Bantuan Sementara Masyarakat (BLSM)***

Efektivitas mekanisme penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dilaksanakan di Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang sepenuhnya dijalankan oleh PT.POS Indonesia berdasarkan Basis Data Terpadu dari PPLS tahun 2011 Badan Pusat Statistik (BPS). Terkesan dadakan karena program ini baru saja diluncurkan setelah ditetapkannya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Bantuan Langsung Sementara Masyarakat merupakan Program Kompensasi dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat miskin dan rentan yang terkena dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dalam pelaksanaannya kurang terkoordinasi dengan baik karena dalam pendataannya tidak melibatkan pihak Rukun Tetangga ataupun Pemerintah Daerah setempat, sehingga penyalurannya dirasa kurang efektif karena datanya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan karena warga yang tidak seharusnya menerima bantuan mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sedangkan warga yang sudah jelas terdaftar sebagai penerima Raskin justru tidak mendapatkan Bantuan. Kendala tersebut pada dasarnya bersumber pada Basis Data yang menjadi acuan Direktori rumah tangga miskin.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara juga dalam proses sosialisasi yang terkesan singkat dan terburu-buru, banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Hambatan yang lain juga dihadapi ialah dalam hal penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dalam pemutakhiran datanya apabila Rumah Tangga Sasaran (RTS) Rumah kosong, Alamat tidak lengkap, Alamat tidak dikenal, Rumah Tangga pindah, Kiriman ditolak, Rumah Tangga yang seluruh anggotanya telah meninggal. Sehingga butuh waktu cukup lama untuk menyalurkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan proses pemutakhiran datanya untuk kemudian dicarikan warga penggantinya.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penerimaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang didistribusikan melalui PT.POS belum efektif. Karena sumber datanya masih belum diperbaharui. Masih berdasarkan PPLS tahun 2011, serta kurangnya keterlibatan ketua RT setempat yang dilibatkan dalam mensukseskan program-program penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan Pemerintah.
2. Proses Penyerahan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) & Kartu identitas oleh Rumah Tangga Sasaran (RTS) ke PT.POS sudah cukup efektif walaupun masih banyak kendala saat pelaksanaannya. Waktu pembayarannya sudah cukup baik seperti yang dijadwalkan, serta pengkoordinasiannya dengan warga sudah cukup baik walaupun program ini terkesan dadakan, akan tetapi petugas yang menangani program ini cukup tanggap untuk membantu beberapa warga yang nampak kebingungan dan memberikan arahan ke beberapa warga yang membutuhkan bantuan.
3. Pemeriksaan data pembayaran Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Kartu identitas Rumah Tangga Sasaran oleh petugas PT.POS sudah cukup efektif walaupun masih banyak kendala saat pelaksanaannya diantaranya berhubungan dengan surat kuasa, masyarakat masih banyak yang bingung dan tidak mau repot.
4. Perolehan Manfaat Program (BLSM) Bantuan Langsung Sementara Masyarakat bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) tidak begitu berpengaruh dalam membantu kehidupan sehari-hari warga Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, karena jumlahnya yang hanya sekitar Rp 150.000/bulan sedangkan biaya hidup di Balikpapan sangat tinggi.
5. Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) masih mengalami hambatan-hambatan yang disebabkan program ini yang terkesan dadakan sehingga datanya belum terorganisir dengan baik, serta belum disesuaikan dengan kondisi lapangan karna masih mengacu pada PPLS tahun 2011 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat. Periode pemutakhiran datanya tidak diketahui sampai saat ini. Bahkan untuk program kemiskinan setelah BLSM untuk Kartu Indonesia Sejahtera masih menggunakan data PPLS 2011.

### ***Saran***

Setelah melalui beberapa macam penelitian, dengan rendah hati penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat kepada semua pihak. Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagi petugas pendata perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam mekanisme penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (P4S), dan semua pihak yang berkepentingan dalam mekanisme penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
2. Bagi petugas yang melakukan pendataan dalam proses direktori rumah tangga miskin, sebaiknya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dimengerti dan jangan terlalu bersifat pribadi, sehingga mempermudah masyarakat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Serta pihak-pihak terkait seperti kelurahan dan kecamatan hendaknya melakukan pendataan berkala setiap tahunnya untuk mengetahui grafik perekonomian penduduk di kota Balikpapan supaya penyaluran dana kompensasi kenaikan BBM tepat sasaran dan tidak semata membebankan tugas pendataan kepada BPS dan PEMKOT Balikpapan.
3. Bagi kantor pos hendaknya dalam proses pencairan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak dilaksanakan pada hari dan waktu yang berbeda agar tidak terjadi keributan. Dan bagi yang belum mendapatkan dana Bantuan hendaknya tidak dipersulit dalam mencairkan dananya. Serta berikan arahan yang jelas waktu, tempat, kelengkapan identitas, dan batas waktu pengambilan dananya.
4. Bagi petugas pelaksana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dalam proses sosialisasi sebaiknya mensosialisasikan program ini dengan jelas kapan dan bagaimana pelaksanaannya, sehingga masyarakat dapat memahami sepenuhnya tentang Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dengan tertib dan terarah.
5. Bagi ketua Rukun Tetangga seharusnya lebih aktif dalam memperhatikan warga di lingkungannya, jangan sampai terjadi kekeliruan antara yang berhak menerima dan yang tidak berhak menerima.
6. Bagi setiap warga yang berdomisili tidak tetap atau berpindah pindah mengontrak untuk dapat melaporkan perihal keberadaannya atau kepisahannya kepada ketua RT setempat untuk pendataan berkala atau arsip RT.pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) hendaknya harus bisa membantu petugas dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

#### *Daftar Pustaka*

- Anonim , Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, 2005, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Jakarta. Balai Pustaka.
- Dantes, Nyoman. 2012. ***Metode Penelitian***. CV.Andi, Bandung.
- Hastuti, Syaikhul Usman, Bambang Sulaksono, Sulton Mawardi, dan Muhammad Syukri, 2013. ***Pemantauan Cepat Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)***, Lembaga Penelitian Semeru, Jakarta.

- Indiahono Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*, Gava Media, Yogyakarta.
- Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Cetakan Pertama, 2013. *Panduan TKS Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)*, Kementerian SOSIAL, Jakarta.
- Kuniawan, Agung. 2005. *Transfortasi Pelayanan Publik*.Pembaruan. Yogyakarta.
- Kurniawan, 2012. *Metode Penelitian Admnistrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Miles B Matthew & Huberman, A Michael Huberman, 2007. *Analisis Data Kualitatif,diterjemahkan oleh tjetjep Rohand Rohidi*, Universitas Indonesia (UI Perss), Jakarta.
- Moleong, J. Lexi, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda karya, Bandung.
- Nasucha, Chaizi, 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek*.PT. Grasindo, Jakarta.
- Nawawi Ismail, 2007. *Public Policy Analisis, Strategi, Advokasi Teori dan Praktek*,cv.putra media nusantara,Surabaya.
- Pasolong, Harbani. 2007, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Ritonga, Hamonagan. 2003. *Perhitungan Penduduk Miskin*.BPS. Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak.dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik. Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Sub Direktorat Analisis Statistik, 2008. *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Subarsono AG, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep,Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono , 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*.Alfabeta. Bandung.
- Suharto Edi, 2005. *Kebijakan Publik panduan prektis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*, Alfabeta, Bandung.
- Suharto Edi, 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Supardi, Suparlan, 2005, *Kemiskinan di Perkotaan Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Teguh Dartanto, 2013. *Si Miskin dan BLSM : Antara Teori, Implementasi, dan Soslusi*,Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tim Sosialisasi Penyesuaian Bahan Bakar Minyak, 2013. *Sosialisasi dan Implementasi Program – Program Kompensasi Kebijakan PenyesuaianSubsidi Bahan Bakar Minyak*,Sekertariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Tim Sosialisasi Penyesuaian Bahan Bakar Minyak, 2013. *Solusi Masalah Kepesertaan dan Pemutakhiran Data Penerima Kartu Perlindungan*

*Sosial (KPS)*, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiyadi Akbar, 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Waluyo, 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. CV. Mandar Maju, Bandung.

Dokumen – Dokumen :

Undang – Undang No.13 Tahun 2011 tentang *penanggungan fakir miskin*,

Undang – Undang No.11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*,

Undang – Undang No.39 Tahun 2012 tentang *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*,

Intruksi Mendagri No.541/3150/SJ tentang *Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan masyarakat*.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2012 tentang *Harga Jual dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu*,

Intruksi Presiden No.5 Tahun 2013 Tentang *Sosialisasi Penyesuaian Subsidi BBM*,

*Undang – Undang Penanganan Fakir Miskin dan Kesejahteraan Sosial*, Fokusindo Mandiri, Bandung.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan No.8 Tahun 2004 tentang *Penanggulangan Kemiskinan di kota Balikpapan*,

Satgas BLSM, *Mekanisme Percepatan Pembayaran BLSM 2013*, PT.POS INDONESIA(PERSERO) , Bandung.